

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR DALAM PENGOLAHAN IKAN LAUT UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Coast Women Empowerment to Proccessing Sea Fish for Increase Their Economic Family Level in Kusan Hilir District, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province

Devi Permata Ijswari *, Djoko Santoso, Eka Radiah

Prodi Agribisnis/Jurusan SEP, Fak. Pertanian – Univ. Lambung Mangkurat, Banjarbaru – Kalimantan Selatan

*Corresponding author: devi.permata64@gmail.com

Abstrak. Sebagian besar dari perempuan di Indonesia berupaya menutupi kekurangan kebutuhan keluarga karena penghasilan suami kecil dan tidak menentu. Oleh karena itu untuk menambah pendapatan maka perempuan pesisir melakukan kegiatan produktif diluar pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga seperti bekerja sebagai buruh upah atau sebagai pemilik usaha di sektor pengolahan hasil ikan. Akan tetapi, pengolahan hasil ikan laut yang dilakukan masih dikelola secara tradisional dan kurangnya pengetahuan perempuan pesisir dalam mengolah hasil laut tersebut membuat usaha yang dilakukan tidak berkembang. Sehingga, perlu adanya pemberdayaan dari pemerintah bagi perempuan pesisir. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terkadang adanya yang tepat sasaran dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan peran pemberdayaan perempuan pesisir dalam pengolahan ikan laut untuk meningkatkan ekonomi keluarga di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2018. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kemudian dikaitkan dengan teori yang ada, selain itu penelitian ini juga menggunakan penilaian kriteria sehat usaha. Berdasarkan hasil penelitian bentuk pemberdayaan yang diberikan terdiri dari pelatihan pengolahan hasil perikanan, bantuan permodalan, peralatan produksi, pemasaran/promosi, bimbingan kegiatan administrasi dan pembangunan sentra pengolahan hasil perikanan. Pemberdayaan yang di berikan pemerintah sudah menunjang untuk memberikan perubahan bagi anggota kelompok kearah yang lebih baik agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga, akan tetapi pemberdayaan yang dilakukan masih kurang optimal.

Kata kunci: pemberdayaan, perempuan pesisir, sehat usaha, ekonomi keluarga.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjelaskan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Pada situasi tersebut, tingginya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan yang kaya. Sedangkan masyarakat lain yang tinggal di pedesaan atau pinggiran kota mendapat porsi yang kecil dan tertinggal.

Dalam RPJM-N 2015-2019 disebutkan bahwa sasaran pembangunan sektor unggulan untuk kedaulatan pangan diantaranya yaitu: meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat salah satunya dengan mengkonsumsi protein yang didapatkan dari ikan, dan sasaran pembangunan dimensi pemerataan antar wilayah pembangunan pedesaan yaitu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sumber daya alam sangatlah beragam, tidak terkecuali salah satunya adalah sumber daya alam hewani yaitu perikanan. Salah satu hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan yaitu ikan.

Sektor perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional. Pembangunan perikanan yang dilakukan dewasa ini diarahkan pada peningkatan kontribusi dalam terciptanya khususnya subsektor perikanan. Pada saat ini telah dirasakan hasilnya berupa produk perikanan yang semakin meningkat. Di Indonesia sendiri khususnya di wilayah pesisir sudah banyak hasil pangan yang berbahan dasar ikan laut.

Sampai saat ini keberadaan masyarakat pesisir sangat menopang kemandirian bangsa mengingat banyak potensi yang dimiliki. Perhatian terhadap kawasan pesisir tidak hanya didasari oleh pertimbangan pemikiran bahwa kawasan itu tidak hanya menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar, tetapi juga potensi sosial masyarakat yang akan mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Salah satu unsur potensi sosial tersebut adalah kaum perempuan pesisir (Kusnadi, 2006).

Sebagian besar dari perempuan di Indonesia berupaya menutupi kekurangan kebutuhan keluarga karena penghasilan suami kecil dan tidak menentu tidak terkecuali pada perempuan pesisir di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada umumnya sebagian perempuan pesisir di desa yang ada di Kecamatan Kusan Hilir tersebut untuk menambah pendapatan keluarga, mereka melakukan kegiatan produktif diluar pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga seperti sebagai buruh upah ataupun sebagai pemilik usaha di sektor pengolahan hasil ikan seperti: pengolahan kerupuk ikan, pengolahan bakso ikan, pengeringan ikan, perdagangan ikan segar dan lainnya. Akan tetapi, pengolahan hasil ikan laut yang dilakukan oleh perempuan pesisir tersebut masih dikelola secara tradisional dan kurangnya pengetahuan perempuan pesisir dalam mengolah hasil laut tersebut sehingga usaha yang dilakukan tidak berkembang.

Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan bagi perempuan yang tinggal di wilayah pesisir. Agar mendapatkan pelatihan ataupun bantuan maka perempuan tersebut harus membentuk kelompok seperti UMKM. Menurut data dari

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 terdapat 9 kelompok di wilayah pesisir yang diberdayakan yang oleh dinas terkait.

Akan tetapi, pada kenyataannya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ada yang tepat sasaran dan terkadang tidak tepat sasaran. Sedangkan disisi lain ada masyarakat yang lebih tepat membutuhkan bantuan dari pemerintah terkait.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut: (1) mengetahui bentuk pemberdayaan perempuan pesisir dalam pengolahan ikan laut untuk meningkatkan ekonomi keluarga di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan; dan (2) mengetahui apa saja peran pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai langkah awal analisa tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir dan dapat menjadi rekomendasi bagi perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 sampai Oktober 2018. Mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data hingga tahap penyusunan laporan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada responden yang terdiri dari tiga UMKM. Ada 3 UMKM yang menjadi responden yaitu kelompok Pantai bersujud, Mina usaha dan Usaha bersama, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian partisipatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Analisis Data

Untuk menjawab tujuan pertama dapat diketahui dengan cara hasil penelitian berupa data, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. kemudian dirujuk dengan teori yang ada.

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu mengetahui peran pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif setelah itu dikaitkan dengan teori yang ada. Selain itu peneliti juga membandingkan tiga kelompok yang terdiri dari kelompok yang usahanya masih berlanjut dan tidak berlanjut. Untuk membandingkan ketiga kelompok tersebut peneliti mengevaluasi ketiga kelompok usaha berdasarkan kriteria sehat usaha yang terdiri dari sehat organisasi, sehat administrasi dan sehat usaha. Sehat organisasi terdiri dari 5 komponen. Adapun komponen sehat organisasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komponen sehat organisasi

Komponen	Kondisi (ada/tidak) (tertulis/tidak)	Skor
Struktur organisasi usaha		
Deskripsi pembagian kerja		
Prosedur kerja		
Standar prosedur kerja		
Tujuan organisasi		

Kemudian sehat administrasi terdiri dari 8 komponen. Adapun komponen sehat administrasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen sehat administrasi

Komponen	Kondisi (ada/tidak) (tertulis/tidak)	Skor
Buku/catatan kas masuk		
Buku/catatan kas keluar		
Buku/catatan persediaan		
Buku/catatan hutang		
Buku/catatan piutang		
Buku/catatan inventaris		
Buku/catatan penjualan		
Buku/catatan pembelian		

Untuk komponen sehat organisasi dan sehat administrasi, jika kondisi satu komponen ada

dan tertulis maka diberi skor 2, jika kondisi ada dan tidak tertulis maka diberi skor 1 dan jika kondisi tidak ada maka diberi skor 0.

Untuk menghitung nilai sehat organisasi dan sehat administrasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$N = \frac{SK}{SM} \times 100 \% \quad (1)$$

dengan: N Nilai sehat organisasi/administrasi

SK Total skor komponen

SM Skor Maksimum

Selanjutnya persentase nilai sehat organisasi dan sehat administrasi diinterpretasikan dalam kalimat kualitatif dengan cara sebagai berikut (Riduwan, 2013):

- Sangat tidak sehat : Jika N = 0 – 20 %
- Tidak sehat : Jika N = 21 – 40 %
- Cukup sehat : Jika N = 41 – 60 %
- Sehat : Jika N = 61 – 80 %
- Sangat sehat : Jika N = 81 – 100 %

Sedangkan pada sehat usaha terdiri dari 5 komponen. Adapun komponen sehat usaha dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komponen sehat usaha

Komponen	Nilai
Laporan laba rugi	Positif
Laporan perubahan ekuitas	Positif
Neraca	Positif
Laporan arus kas	Positif
Catatan atas laporan keuangan	Baik

Suatu usaha dikatakan sehat jika laporan keuangannya bernilai positif artinya mendapatkan laba, lebih banyak aset daripada kewajiban, mengalami peningkatan modal dan arus kas.

Dari hasil analisis ketiga kriteria sehat usaha diatas maka dilakukan evaluasi berdasarkan tujuan pemberdayaan dan prinsip-prinsip pemberdayaan dengan cara data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah menguraikan gambaran tentang identitas responden. Identitas

responden meliputi identitas UMKM, umur responden, pendidikan responden, pekerjaan responden, dan jabatan responden dalam usaha.

Identitas UMKM. Dalam penelitian ini terdapat tiga UMKM yang menjadi objek penelitian dimana perempuan yang terlibat dalam UMKM tersebut menjadi responden dalam penelitian ini. UMKM yang menjadi objek penelitian terdiri dari dua usaha yang berkelanjutan dan satu usaha tidak berlanjut setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dinas terkait.

UMKM pertama yaitu Mina usaha yang memproduksi bakso ikan. Mina usaha sampai saat ini beranggotakan sepuluh orang. Kelompok ini mayoritas terdiri dari laki-laki, hanya sebagian kecil perempuan yang terlibat didalam kegiatan produksi. Kelompok ini termasuk usaha yang berkelanjutan setelah dilakukan pemberdayaan.

Kemudian UMKM kedua yaitu Pantai Bersujud yang memproduksi berbagai macam olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, nugget ikan dan pempek. Kelompok ini beranggotakan perempuan yang kesehariannya menjadi ibu rumah tangga. Kelompok ini juga termasuk usaha yang berlanjut setelah adanya pemberdayaan.

Terakhir UMKM ketiga yaitu Usaha Bersama yang memproduksi kerupuk ikan. Usaha bersama merupakan UMKM yang sudah tidak berlanjut setelah adanya pemberdayaan.

Umur Responden. Responden dalam penelitian ini adalah perempuan yang terlibat dalam kelompok yang diberdayakan oleh pemerintah di Kecamatan Kusan Hilir. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa umur responden berkisar antara 36 – 47 tahun.

Pendidikan Responden. Adapun tingkat pendidikan responden yaitu satu orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), satu orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dua orang berpendidikan Sarjana.

Pekerjaan Responden. Pekerjaan responden dalam penelitian ini selain mengelola kelompok, responden juga mempunyai pekerjaan utama yaitu ada yang bekerja sebagai guru, ibu rumah tangga, dan pedagang.

Jabatan Responden dalam Usaha. Responden dari ketiga usaha terdiri dari beberapa jabatan. Jabatan responden dalam usaha dari ke tiga kelompok tersebut antara lain sebagai pemilik usaha, ketua kelompok, bendahara dan anggota kelompok.

Bentuk Pemberdayaan Perempuan Pesisir

Pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan, kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: kelompok pertama yaitu Mina usaha yang merupakan kelompok binaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yang bergerak di bidang pengolahan dan penjualan bakso ikan. Mina usaha merupakan salah satu usaha yang sampai saat ini masih berlanjut setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, selain itu sampai saat ini Mina usaha juga masih mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa alat maupun pelatihan.

Kelompok Mina usaha berdiri pada tahun 2011. Pada tahun 2011 Mina usaha juga mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BLM PUMP) senilai Rp 50.000.000 dalam bentuk sarana berupa: mesin pencetak pentol, mesin pemisah daging dan tulang, dan alat pengaduk ikan.

Sampai saat ini kelompok Mina usaha beranggotakan sepuluh orang yang terdiri dari enam orang laki-laki dan empat orang perempuan. Dari empat orang perempuan yang menjadi anggota, hanya satu orang perempuan yang sampai saat ini masih aktif dalam kegiatan produksi pengolahan bakso ikan.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pada kelompok Mina usaha antara lain:

1. Memberikan bantuan berupa pengadaan alat dalam proses produksi bakso ikan dan

pembangunan sentra pengolahan hasil perikanan;

2. Membantu dalam hal pemasaran;
3. Membantu dan membimbing dalam kegiatan administrasi seperti pengurusan label halal dan pendirian badan hukum; dan
4. Memberikan pelatihan pengolahan bakso dan nugget dimulai dari produksi hingga pengemasan.

Adapun kelompok yang kedua yaitu Pantai bersujud. Kelompok Pantai bersujud merupakan kelompok binaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yang bergerak dibidang pengolahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, nugget ikan dan pempek ikan. Kelompok Pantai bersujud merupakan salah satu usaha yang sampai saat ini masih berlanjut setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Kelompok Pantai bersujud terbentuk pada tahun 2012.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pada kelompok pantai bersujud antara lain:

1. Memberikan bantuan berupa pengadaan alat giling ikan; dan
2. Mengikutkan pelatihan pengolahan hasil perikanan.

Kelompok ketiga yaitu Usaha bersama yang juga merupakan kelompok binaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kelompok usaha bersama bergerak dibidang pengolahan kerupuk ikan. Usaha bersama merupakan usaha yang sudah tidak berlanjut lagi setelah adanya pemberdayaan.

Kelompok Usaha bersama terbentuk pada tahun 2012. Awal mula terbentuknya karena pada saat itu ada program berupa bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. Akan tetapi, setelah satu kali produksi usaha ini sudah tidak berlanjut lagi dikarenakan adanya suatu masalah. Karena usahanya sudah tidak berjalan lagi, maka bantuan yang diberikan dari dinas terkait kemudian dibagikan kepada anggota yang menjadi bagian dari kelompok Usaha bersama ini.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada kelompok Usaha bersama yaitu berupa bantuan dana sebesar Rp 10.000.000 yang diberikan kepada kelompok Usaha bersama. Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan dan bahan yang digunakan untuk memproduksi kerupuk ikan. Adapun alat dan bahan meliputi: Penggiling ikan manual,

kompor, panci, pisau, nampan dan bahan untuk membuat kerupuk ikan.

Dari ketiga kelompok tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan bentuk pemberdayaan yang diperoleh oleh kelompok, seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa kelompok Mina Usaha mendapatkan bentuk pemberdayaan yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan kelompok yang berlokasi di sentra pengolahan itu langsung di bawah Dinas Perikanan Tanah Bumbu, artinya semacam UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang pengolahan ikan. Nama kantor/UPT tersebut adalah Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tanah Bumbu. Jadi sentra merupakan kantor, sehingga segala kebutuhan sarana dan prasarana dianggarkan dan diprioritaskan. Untuk sentra sendiri sebenarnya dulunya terdiri dari banyak kelompok, akan tetapi sekarang hanya satu kelompok saja yang aktif yaitu kelompok Mina usaha.

Perbedaan bentuk pemberdayaan juga disebabkan karena ketidaktahuan kelompok mengenai bagaimana pembuatan usulan proposal agar dapat memperoleh bantuan dari pemerintah. Selain itu berdasarkan informasi dari penyuluh setempat diketahui bahwa untuk usulan proposal tersebut tergantung dari masing-masing kelompok, jika kelompok tersebut mau mengusulkan proposal maka penyuluh akan mendampingi, dan terkadang sudah dibuatkan proposal dan sudah di sampaikan ke dinas yang bersangkutan akan tetapi tidak dapat direalisasikan karena semua tergantung anggaran dinas dan kebijakan dari dinas terkait, selain itu juga usulan proposal juga ditinjau dari skala prioritas dan kebutuhan kelompok saat itu.

Pemberdayaan yang dilakukan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dalam pemberdayaan masyarakat, dapat mencapai tujuan pemberdayaan itu sendiri dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan akses sumberdaya alam diketahui tidak ada bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Ketiga kelompok tersebut mudah mendapatkan sumber daya tersebut karena mereka berada di wilayah pesisir. Kemudian untuk akses modal, pemerintah memberikan dana yang dapat digunakan sebagai modal usaha maupun untuk mengembangkan usaha selain itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa peralatan untuk kegiatan produksi. Sementara itu, dari segi akses partisipasi, pemerintah

memberikan kesempatan agar membentuk kelompok untuk mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah. Akan tetapi, antusias masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan produksi dalam kelompok hanya terlihat di awal saja, karena dari tahun ke tahun anggota dari kelompok tersebut semakin berkurang bahkan sampai tidak melanjutkan usaha tersebut. Sementara itu untuk kemudahan dalam akses ilmu pengetahuan dan informasi, pemerintah memberikan pelatihan yang dapat membuat pengetahuan perempuan pesisir menjadi bertambah dan dapat membuat produk yang lebih inovatif.

Dilihat dari segi perbaikan kelembagaan pemerintah juga membantu dan membimbing kelompok dalam manajemen produksi maupun jaringan pemasaran, selain itu juga membantu dan membimbing dalam pengurusan kegiatan administrasi seperti pengurusan label halal dan pendirian badan hukum. Tetapi disisi lain tidak semua kelompok mendapatkan hal tersebut sehingga membuat kelompok yang lain tidak memiliki jalur pemasaran sendiri. Selain itu kendala yang dihadapi kelompok yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan administrasi dan terkadang masih lemahnya posisi tawar menawar yang dialami kelompok. Sedangkan untuk perbaikan usaha pemerintah memberikan bantuan dana, pelatihan maupun pembangunan sentra produksi agar usaha yang dijalankan oleh kelompok dapat berkembang, sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai, meskipun tidak semua kelompok yang mendapatkan pemberdayaan tersebut.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir. Berdasarkan prinsip tujuan pemberdayaan, diketahui bahwa bantuan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

Berdasarkan prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal, dapat dilihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah masih menganut prinsip pengetahuan modern yang sering dianggap bahwa pihak yang ingin memberdayakan dianggap mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir padahal kenyataannya permasalahan yang dihadapi masih belum bisa terselesaikan.

Begitu pula berkaitan dengan nilai lokal yang sebenarnya ada nilai lokal yang potensial sebagai landasan pemberdayaan seperti pengolahan ikan kering/asin yang sudah sejak dari dulu dilakukan tetapi tidak dikembangkan dengan maksimal.

Kemudian berdasarkan prinsip keberlanjutan, dapat dilihat bahwa kelompok yang diberdayakan oleh pemerintah ada yang berlanjut dan juga ada yang tidak berlanjut. Sehingga membuat masyarakat yang diberdayakan ada yang merasakan perubahan dan ada juga yang tidak merasakan perubahan, baik secara perbaikan usaha maupun perbaikan pendapatan.

Sementara itu berdasarkan prinsip ketepatan kelompok sasaran, pemberdayaan yang dilakukan pemerintah ada yang tepat sasaran seperti kelompok yang masih berlanjut sampai saat ini dan ada juga yang tidak tepat sasaran seperti kelompok yang sudah tidak berlanjut. Kelompok yang dianggap tepat sasaran karena sebelumnya mereka hanya sebagai ibu rumah tangga dan juga ada yang sudah memiliki usaha, akan tetapi masih dilakukan secara tradisional, sehingga dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah membuat mereka mendapatkan pendapatan tambahan dan dapat mengembangkan usaha mereka. Sedangkan kelompok yang sudah tidak berlanjut dianggap tidak tepat sasaran karena anggota kelompok dari kelompok tersebut sebelumnya sudah memiliki pekerjaan tetap, sedangkan masih banyak perempuan di daerah tersebut yang belum memiliki pekerjaan yang seharusnya dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut agar mereka dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

Berdasarkan prinsip kesetaraan gender dapat dilihat bahwa sasaran pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selain melibatkan laki-laki, juga mencakup perempuan pesisir

Peran Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Untuk mengetahui apa saja peran pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, maka penting untuk mengetahui keadaan perempuan pesisir sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan. Adapun keadaan kelompok Mina usaha sebelum adanya pemberdayaan yaitu semua anggota sudah memiliki usaha pembuatan bakso ikan, tetapi masih dilakukan secara manual dan skala rumah

tangga dengan menggunakan peralatan sederhana sehingga jumlah produksinya masih tergolong kecil, selain itu pengetahuan dalam pengolahan produk hasil perikanan juga kurang dan pemasaran produksinya masih di lingkungan kota pagatan saja. Untuk modal berusaha mereka menggunakan dana pribadi dan tenaga kerja yang digunakan pun masih tenaga kerja dalam keluarga saja. Pendapatan yang di dapat dari usaha tersebut lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.

Sedangkan pada kelompok Pantai bersujud, usaha ini dikelola oleh satu orang ibu rumah tangga yang juga sebagai pemilik usaha. Usaha ini mempunyai empat orang tenaga kerja yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sebelum adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, pemilik usaha ini hanya berdagang makanan berupa bakso, lontong dan bihun yang dijual di depan rumah. Penghasilan dari berdagang tersebut sekedar cukup untuk hidup sederhana. Dalam pembuatan baksonya pun masih menggunakan cara tradisional, jumlah produksinya juga sedikit dan pengetahuan dalam pengolahan hasil ikan juga kurang.

Sementara itu, pada kelompok Usaha bersama, anggotanya terdiri dari beragam pekerjaan yaitu ada yang menjadi guru TK, guru SD, pedagang dan ibu rumah tangga. Sehingga sebagian besar anggotanya memiliki penghasilan yang tetap sebelum adanya pemberdayaan dan juga kehidupan anggotanya sudah berkecukupan. Selain itu, sebelum adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah semua anggota kelompok juga belum mempunyai usaha di bidang pengolahan hasil perikanan.

Setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, tentu diharapkan perubahan kehidupan yang lebih baik dari anggota masing-masing kelompok tersebut. Adapun perbaikan yang dirasakan anggota dari masing-masing kelompok setelah adanya pemberdayaan dari pemerintah yaitu : perubahan yang dirasakan oleh kelompok Mina usaha adalah sekarang usahanya sudah mulai berkembang, alat-alat yang digunakan sudah modern dan jumlah produksinya juga lebih besar dari sebelum adanya pemberdayaan, pengetahuan pengolahan produk hasil perikanan lebih bertambah, selain itu pemasaran produk yang awalnya hanya di lingkungan kota pagatan saja, sekarang sudah dipasarkan di minimarket khususnya di daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan selatan, selain itu kelompok ini juga melayani permintaan dari luar kota seperti di daerah Jawa. Dengan adanya pemberdayaan, kelompok ini merasa terbantu dalam memperoleh akses terhadap modal, pasar, partisipasi dan akses ilmu pengetahuan dan informasi. Selain itu dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, kelompok ini merasa terbantu dalam perbaikan kelembagaan meskipun terkadang masih ada masalah yang dihadapi. Dengan adanya pemberdayaan membuat usaha yang dijalankan mengalami perbaikan. Dengan adanya perbaikan usaha maka dampak positif yang dirasakan oleh anggota kelompok yaitu menambah pendapatan, seiring dengan meningkatnya pendapatan maka lingkungan dan kehidupan anggota kelompok tersebut pun juga semakin membaik.

Adapun pada kelompok Pantai bersujud, setelah adanya pelatihan yang di ikuti oleh pemilik usaha kelompok Pantai bersujud, membuat usahanya sekarang sudah berkembang dari sebelumnya. Dalam kegiatan produksi, kelompok ini juga sudah menggunakan peralatan yang modern. Sehingga dapat memperbesar jumlah produksinya. Kemudian, pengetahuan dalam pengolahan hasil perikanan juga semakin bertambah. Dengan adanya pemberdayaan ini juga dapat meningkatkan pendapatan pemilik usaha hingga beliau bisa memperbaiki rumah, membeli perabotan rumah dan membeli mobil. Selain itu juga bisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal disekitar daerahnya. Hal ini berarti dengan adanya pemberdayaan yang diberikan kepada beliau dapat memperbaiki usaha, pendapatan, dilingkungan dan perbaikan kehidupan.

Sementara itu pada kelompok Usaha bersama, awalnya pemerintah memberikan bantuan berupa modal yang diberikan kepada kelompok untuk memulai usaha, tetapi bantuan pemerintah tidak digunakan dengan sebaik mungkin, akibatnya usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi. Sehingga, tidak adanya perbaikan yang dirasakan oleh anggota kelompok baik dari segi perbaikan kelembagaan, usaha, pendapatan, perbaikan lingkungan maupun perbaikan kehidupan. Selain itu keadaan ekonomi anggota kelompok sama saja sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan.

Setelah diketahui keadaan anggota dari ketiga kelompok tersebut sebelum dan sesudah adanya

pemberdayaan, maka dapat diketahui apakah dari adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bisa memberikan manfaat yang nyata kepada kelompok usaha yang dijalankan. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dievaluasi berdasarkan komponen kriteria sehat usaha.

Sehat organisasi. Adapun hasil skor komponen sehat organisasi dari ketiga kelompok dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sehat organisasi kelompok

Kelompok	Skor
Mina Usaha	6
Pantai Bersujud	3
Usaha Bersama	3

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2018)

Berdasarkan tabel diatas, skor dari kelompok Mina usaha yaitu 6, maka nilai yang diperoleh kelompok Mina usaha yaitu 60%. Jadi kelompok ini dapat dikategorikan dalam kelompok yang organisasinya cukup sehat.

Adapun skor komponen sehat organisasi pada kelompok Pantai bersujud antara lain berjumlah 3, maka nilai sehat organisasi kelompok yaitu 30%, sehingga kelompok Pantai bersujud dapat dikategorikan dalam kelompok yang organisasinya tidak sehat.

Sementara itu pada kelompok Usaha bersama, diketahui skor komponen sehat organisasi juga berjumlah 3 (tiga), maka nilai sehat organisasi diperoleh yaitu 30%, jadi kelompok Usaha bersama dapat dikategorikan dalam kelompok yang organisasinya tidak sehat.

Sehat Administrasi. Adapun hasil skor komponen sehat administrasi dari ketiga kelompok dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sehat administrasi kelompok

Kelompok	Skor
Mina Usaha	8
Pantai Bersujud	0
Usaha Bersama	2

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2018)

Berdasarkan Tabel 5, kelompok Mina usaha diketahui skor komponen sehat administrasi berjumlah 8, maka nilai sehat administrasi kelompok Mina usaha yaitu 50%, sehingga kelompok Mina usaha dapat dikategorikan dalam kelompok yang administrasinya cukup sehat.

Kemudian kelompok Pantai bersujud, diketahui skor komponen sehat administrasi berjumlah 0, maka nilai sehat administrasi kelompok Pantai bersujud yaitu 0%. Jadi kelompok Pantai bersujud dapat dikategorikan dalam kelompok yang administrasinya sangat tidak sehat.

Sedangkan kelompok Usaha bersama, diketahui skor komponen sehat administrasi berjumlah 2, maka nilai sehat administrasinya kelompok Usaha bersama adalah 12,5%. Jadi kelompok Usaha bersama dapat dikategorikan dalam kelompok yang administrasinya sangat tidak sehat.

Sehat Usaha. Pada kelompok Mina usaha, penilaian sehat usaha yang terdiri dari laporan rugi laba, perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kasnya tidak dapat dinilai karena catatan administrasi kelompok tidak lengkap, tetapi dapat dilihat rincian biaya kelompok mina usaha pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian biaya kelompok mina usaha dalam satu kali produksi

Pengeluaran	Biaya (Rp)
Bahan baku	1.974.000
Ikan	4.320.000
Gas	170.000
Gaji	1.050.000
Kemasan	600.000
Transport	1.000.000
Perawatan	150.000
Lain-lain	100.000
Total biaya	9.364.000

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2018)

Berdasarkan Tabel 6, total biaya yang dikeluarkan pada kelompok Mina usaha dalam satu kali produksi yaitu sebesar Rp 9.364.000, dengan hasil produksi sebanyak 250 kg bakso ikan. Harga jual bakso ikan satu kg yaitu sebesar Rp 40.000. Adapun Hasil penjualan satu kali produksi yaitu sebesar Rp 10.000.000. Jadi, keuntungan kotor yang didapat untuk satu kali produksi yaitu sebesar Rp 636.000.

Adapun pada kelompok Pantai bersujud, penilaian sehat usaha tidak dapat dinilai karena catatan administrasi kelompok Pantai bersujud tidak lengkap, tetapi dapat dilihat Rincian biaya kelompok Pantai bersujud pada Tabel 7.

Berdasarkan pada Tabel 7, total biaya yang dikeluarkan pada kelompok Pantai bersujud dalam satu kali produksi yaitu Rp 1.404.500

dengan hasil produksi sebanyak 70 kg bakso ikan. Harga jual bakso ikan satu kg yaitu sebesar Rp 40.000. Hasil penjualan satu kali produksi yaitu sebesar Rp 2.800.000. Jadi, keuntungan kotor yang didapat untuk satu kali produksi yaitu sebesar Rp 1.395.500. Keuntungan tersebut belum dikurangi dengan biaya transport, biaya perawatan jika terjadi kerusakan mesin dan biaya lain-lain seperti biaya makan pada saat proses produksi.

Tabel 7. Biaya kelompok Pantai bersujud dalam satu kali produksi

Pengeluaran	Biaya (Rp)
Bahan baku	374.500
Ikan	560.000
Gas	60.000
Gaji	400.000
Kemasan	10.000
Total biaya	1.404.500

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2018)

Sementara itu, pada kelompok Usaha bersama penilaian sehat usaha yang terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kasnya tidak dapat dinilai. Hal ini disebabkan karena usahanya sudah tidak berjalan lagi, kemudian produksi hanya dilakukan satu kali saja dan catatan administrasi kelompok Usaha bersama juga tidak lengkap.

Berdasarkan Tabel 6 dan Tabel 7 dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh kelompok Mina usaha lebih besar dari pada kelompok Pantai bersujud, sedangkan keuntungan kotor yang didapat untuk satu kali produksi lebih besar kelompok Pantai bersujud dari pada kelompok Mina usaha, hal ini dikarenakan pada kelompok Pantai bersujud tidak memperhitungkan biaya transport, biaya perawatan dan biaya lain-lain. Kelompok Pantai bersujud tidak memasukkan biaya transport karena pembeli langsung datang ke tempat produksi untuk membeli bakso ikan tersebut, walaupun harus dikirim maka yang menanggung biaya tersebut yaitu pembeli, selain itu biaya transport pembelian bahan baku pada kelompok Pantai bersujud juga tidak dihitung karena untuk lokasi pembelian bahan baku seperti ikan itu jaraknya dekat dengan tempat produksi pada kelompok tersebut sehingga biaya tersebut tidak diperhitungkan. Sedangkan untuk pembelian bahan baku yang lain seperti tepung, bawang dan bumbu lainnya pemilik usaha tersebut juga tidak memperhitungkan biaya transport karena

pada saat pemilik usaha pergi ke pasar, selain untuk membeli kebutuhan dapur di rumah beliau juga membeli bahan untuk kebutuhan produksi. Sedangkan untuk biaya perawatan mesin, kelompok tersebut tidak pernah memperhitungkan karena biaya perawatan mesin tersebut diperhitungkan hanya pada saat terjadi kerusakan mesin. Kemudian untuk biaya lain-lain seperti biaya makan tidak diperhitungkan karena makanan dimasak sendiri dan menggunakan bahan pribadi sedangkan pada kelompok Mina usaha mengeluarkan biaya makan karena makanannya membeli di warung makan sehingga kelompok Mina usaha harus mengeluarkan biaya makanan setiap kali produksi.

Implikasi dari Peran Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah menunjang untuk memberikan perubahan bagi kelompok kearah yang lebih baik seperti adanya perbaikan kelembagaan yang dirasakan pada kelompok Mina usaha, selain itu perbaikan pendapatan juga dirasakan oleh kelompok Mina usaha dan Pantai bersujud. Seiring adanya perbaikan kelembagaan dan pendapatan maka diharapkan juga dapat memperbaiki kehidupan dan lingkungan anggota kelompok tersebut. Akan tetapi, tidak semua kelompok mendapatkan bimbingan yang berhubungan dengan kelembagaan, administrasi maupun manajemen kelompok. Seperti yang terjadi pada kelompok Pantai bersujud, contohnya dalam hal pencatatan keuangan, sulit untuk membedakan mana uang pribadi dan mana uang kelompok karena memang catatan administrasi kelompoknya tidak lengkap. Selain itu, sebelum terjadinya kerusakan alat, kelompok tersebut tidak pernah memperhitungkan biaya kerusakan (pemeliharaan) yang nantinya akan dikeluarkan ataupun biaya untuk penggantian alat jika terjadi kerusakan. Sehingga ketika terjadi kerusakan alat, membuat proses produksi terhenti sementara sampai alat tersebut selesai diperbaiki. Hal ini membuat pemberdayaan yang diberikan pemerintah menjadi kurang optimal. Selain itu kurang tepatnya sasaran kelompok membuat usaha tidak dapat berlanjut. Sedangkan masih banyak perempuan pesisir yang masih membutuhkan pemberdayaan dari pemerintah setempat agar dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarganya.

Oleh karena itu, seharusnya pihak pemerintah memberikan bimbingan yang merata antar

kelompok mengenai pentingnya kesehatan organisasi, administrasi maupun kesehatan usaha dalam suatu kelompok. Selain itu pemerintah juga harus selektif lagi dalam menetapkan sasaran pemberdayaan agar usaha yang dijalankan dapat terus berlanjut sehingga tujuan pemberdayaan yang diinginkan dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan ekonomi keluarga diberikan secara berkelompok. Dari ketiga kelompok usaha, bentuk pemberdayaan yang diberikan terdiri dari pelatihan pengolahan hasil perikanan, bantuan permodalan, bantuan peralatan produksi, pemasaran/promosi, bimbingan kegiatan administrasi dan pembangunan sentra pengolahan hasil perikanan.
2. Peran pemberdayaan perempuan pesisir, bagi perempuan pada kelompok Mina usaha dan Pantai bersujud dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam rumah tangga sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga, sedangkan bagi perempuan pada kelompok Usaha bersama pemberdayaan yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya sehingga tidak memberikan perubahan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Sehingga, pemberdayaan yang dilakukan pemerintah masih kurang optimal.

Saran

1. Bagi ketiga kelompok usaha diharapkan lebih berpedoman pada kriteria sehat usaha yaitu sehat organisasi, sehat administrasi dan sehat usaha agar usaha yang dijalankan mampu mencapai tujuan berdasarkan manajemen yang baik.
2. Bagi Dinas terkait sebaiknya memberikan bimbingan mengenai pentingnya kriteria sehat usaha, karena masih terdapat kelompok yang tidak mengetahui cara pencatatan administrasi yang baik dan benar. Selain itu pemerintah agar lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat

atau kelompok yang memang membutuhkan sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi juga masyarakat dijadikan sebagai subjek dari upaya pembangunan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu. 2018. *Kecamatan Kusan Hilir Dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Tanah Bumbu.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. 2017. *Data Kelompok Pengolah/UKM Pengolah Hasil Laut Kabupaten Tanah Bumbu*. Kalimantan Selatan.
- Kusnadi. Sulistiyowati, H., Sumarjono & Prasodjo, Adi. 2006. *Perempuan Pesisir*. LKiS, Yogyakarta.
- Riduwan. 2013. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.